

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lanskap politik dunia mengalami perubahan mendasar yang sepenuhnya mengubah cara pandang hubungan antar bangsa Pasca berakhirnya Perang Dingin. Isu-isu ideologis besar antara kapitalisme dan sosialisme yang mendominasi dinamika global selama puluhan tahun mengalami pelonggaran, digantikan oleh munculnya politik identitas yang menjadikan sentimen keagamaan, etnis, dan budaya sebagai pemicu ketegangan baru dalam tatanan dunia setelah 1990.¹ Pandangan Azyumardi Azra Fenomena ini menimbulkan tantangan konseptual bagi negara-negara demokratis, terutama di dunia Islam, dalam mencari keseimbangan antara kebebasan beragama, solidaritas masyarakat, dan stabilitas politik. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang sedang membangun demokrasi pasca-Reformasi 1998, menjadi medan perdebatan rumit antara prinsip demokrasi, nasionalisme, dan keberagamaan.² Perubahan global ini tidak hanya memengaruhi interaksi antarnegara, tetapi juga langsung mempengaruhi dinamika politik dalam negeri di berbagai negara, termasuk Indonesia, di mana masalah identitas agama mulai muncul dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peralihan Indonesia ke Era Reformasi setelah 1998 menandai fase baru dalam sejarah politik domestik yang penuh harapan namun juga ketidakpastian. Keruntuhan rezim Orde Baru yang otoriter dan represif membawa gelombang kebebasan yang terwujud dalam liberalisasi ruang publik secara besar-besaran. Arena politik yang sebelumnya dikuasai negara melalui

¹ S. P. Huntington, *Benturan Peradaban Dan Masa Depan Politik Dunia*, Terj. M. Sadat Ismail., ed. Ruslani (Yogyakarta: Qalam, 2003). 125-136.

² Azyumardi Azra (1955–2022) adalah cendekiawan Muslim Indonesia, guru besar sejarah dan pemikiran Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, serta mantan Rektor UIN Jakarta (1998–2006). Ia dikenal sebagai salah satu pemikir Islam moderat Indonesia yang banyak menulis tentang Islam, demokrasi, dan modernisasi di dunia Muslim. Lihat Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, dan Demokrasi: Dinamika dalam Konteks Global* (Jakarta: Solstice Publishing, 2006), hlm. 15. Dalam karyanya, Azra membahas bagaimana dinamika hubungan antara Islam dan demokrasi di Indonesia sering kali menghadapi tantangan dari kelompok-kelompok yang mengedepankan pendekatan konservatif dan menolak nilai-nilai pluralisme, yang relevan untuk memahami latar belakang ideologis kelompok seperti FPI dalam kasus Kerusuhan Monas 1 Juni 2008.

pengawasan ketat tiba-tiba mengalami "ledakan partisipasi" yang diisi oleh ribuan LSM, partai politik, dan organisasi masyarakat yang berusaha mengklaim hak suara setelah lama dibungkam.³ Akan tetapi, gelombang kebebasan ini tidak disertai dengan penguatan kemampuan negara dan penegakan hukum yang stabil. Aparat penegak hukum, terutama kepolisian, sering kali kesulitan menghadapi konflik antarwarga yang baru muncul, sehingga menciptakan apa yang disebut Hadiz (2005) sebagai "oligarki kekerasan" di mana aktor non-negara ikut berkompetisi mengontrol ruang publik.⁴ Kondisi ini menghasilkan paradoks Reformasi yang fundamental di satu pihak, kebebasan berserikat merupakan pencapaian demokratis yang patut dihargai, tetapi di pihak lain, hal itu sering berakhir pada anarki dan kekerasan ketika negara lemah dalam menjalankan kedaulatannya.⁵

Di tengah ruang kebebasan yang terbuka luas ini, komunitas Muslim Indonesia mengalami perpecahan dan polarisasi ideologis yang semakin intens dan terlembagakan. Di satu sisi, ada kelompok yang menganut Islam inklusif-pluralis, yang menerima Pancasila sebagai final dan melihat keragaman sebagai anugerah yang harus dijaga. Kelompok ini biasanya terdiri dari intelektual Muslim, aktivis LSM, dan organisasi Islam tradisional yang telah lama menyesuaikan diri dengan masyarakat Indonesia yang beragam. Di ujung lainnya, muncul kelompok yang berpegang pada Islam konservatif-eksklusif, yang bertujuan menegakkan syariat Islam secara formal dan memurnikan akidah dari aliran yang dianggap menyimpang.⁶

Dalam persaingan ideologis tersebut, isu Ahmadiyah muncul sebagai ujian utama bagi komitmen toleransi dan batasan kebebasan beragama di Indonesia pasca-Reformasi. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), yang telah hadir sejak 1925, menjadi target utama kelompok Islam konservatif-eksklusif karena doktrin kenabiannya pasca Nabi Muhammad, yang dianggap mencemari kemurnian akidah

³ Vedi R Hadiz, *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto* (Jakarta: LP3ES, 2005), 178.

⁴ Ibid., hlm 195.

⁵ Robert W. Hefner, *Civil Islam* (Princeton University Press, 2000), 215.

⁶ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Konteks Global*. (Jakarta: Solstice Publishing, 2006), 178.

Islam. Pasca 1998, serangan terhadap Ahmadiyah tidak lagi terbatas pada bentuk verbal, namun semakin sering berujung pada kekerasan fisik dan penutupan paksa tempat ibadah. Kelompok seperti Front Pembela Islam (FPI) menjadikan isu ini sebagai agenda perjuangan utama, dengan dalih membela akidah umat Islam dari penodaan.⁷ Sementara itu, kelompok Islam inklusif-pluralis dan organisasi masyarakat sipil memandang perlawanan terhadap Ahmadiyah sebagai pintu masuk bagi intoleransi yang lebih luas, yang pada akhirnya mengancam fondasi negara bangsa Indonesia yang majemuk.

Selain konflik Ahmadiyah, ruang publik Indonesia pasca-Reformasi juga diwarnai oleh rangkaian konflik bernuansa agama lainnya yang turut memanaskan suhu politik dan mempertajam polarisasi. Beberapa konflik yang menonjol antara lain penutupan gereja-gereja yang dianggap tidak memiliki izin, kekerasan terhadap penganut aliran kepercayaan, serta serangan terhadap tempat-tempat hiburan yang dianggap "maksiat" selama bulan Ramadhan.⁸ Pola dalam konflik-konflik ini seringkali serupa: aksi ofensif yang dilakukan ormas tertentu dengan FPI sebagai aktor yang paling menonjol diikuti dengan respons negara yang cenderung lamban dan ambigu. Negara seringkali mengambil jalan tengah yang justru mengukuhkan posisi kelompok penekan, seperti menerbitkan peraturan daerah yang membatasi aktivitas minoritas atau membiarkan kekerasan atas nama "menjaga ketertiban umum".⁹

Oleh karena itu, penelitian dengan judul "*Kerusuhan Monas 1 juni 2008: Studi tentang konflik Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Nasional Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)*" ini perlu dilakukan untuk mengurai kompleksitas sejarah yang masih relevan untuk dipikirkan ulang. Pemahaman mendalam tentang akar konflik, dinamika yang berlangsung, dan dampak yang dihasilkan dari peristiwa ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk

⁷ Subhan Asyari, *Fundamentalisme Islam Di Indonesia: Studi Tentang Front Pembela Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 45.

⁸ Ahmad dkk Salim, *Konflik Keagamaan Di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, 2019), 34.

⁹ Martin van Bruinessen, *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 89.

membangun demokrasi yang dewasa dan masyarakat yang inklusif di Indonesia. Lebih dari sekadar mempelajari masa lalu, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada upaya mencegah konflik serupa di masa mendatang, serta memperkuat resiliensi sosial masyarakat Indonesia menghadapi tantangan politik identitas di era demokrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis menyusun untuk menjaga pembahasan ini tidak terlalu luas, Oleh karena itu masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang konflik FPI dan AKKBB yang memicu Kerusuhan Monas 1 Juni 2008?
2. Bagaimana kronologi kejadiannya dan dampak yang ditimbulkan pasca peristiwa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagaimana telah dirumuskan pada rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan latar belakang terjadinya Kerusuhan Monas 1 Juni 2008
2. Untuk menguraikan secara kronologis jalannya peristiwa Kerusuhan Monas dan Untuk menganalisis dampak Kerusuhan Monas, baik terhadap hubungan antara FPI dan AKKBB.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembelajaran dan referensi ilmiah bagi pembaca yang ingin memahami secara lebih mendalam mengenai peristiwa Kerusuhan Monas 1 Juni 2008 beserta latar belakang sosial dan keagamaan yang melingkupinya. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah wawasan baru mengenai dinamika konflik antar-ormas Islam di era Reformasi, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah sosial-keagamaan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji fenomena serupa di wilayah atau periode

yang berbeda, baik dengan fokus pada konflik antar-ormas, isu toleransi beragama, maupun hubungan antara agama dan negara dalam konteks masyarakat demokratis.

D. Kajian Pustaka

Penulis telah mengumpulkan beberapa karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas topik serupa. Tujuannya untuk menghindari plagiasi dan sekaligus menjadikannya sebagai bahan referensi dalam penulisan. Di bawah ini merupakan daftar karya yang sudah ditelusuri:

1. Skripsi yang ditulis oleh Panca Okta Hutabrina, mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2009 yang berjudul *Insiden Monas Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Terhadap Berita Seputar Insiden Monas, 1 Juni 2008, di Harian Kompas dan Republika Periode 2-8 Juni 2008)* Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk mengkaji bagaimana dua surat kabar nasional, Kompas dan Republika, membingkai peristiwa bentrokan antara FPI dan AKKBB yang terjadi di Monas pada 1 Juni 2008. Harian Kompas memaknai Insiden Monas sebagai aksi kekerasan yang mencederai kebhinnekaan, dengan kecenderungan menentang tindakan FPI melalui penonjolan narasumber dari pihak AKKBB dan pemberian porsi lebih besar pada kecaman terhadap kekerasan. Sebaliknya, Republika memaknai peristiwa yang sama sebagai masalah negara yang lamban menyelesaikan kasus Ahmadiyah, dengan menghadirkan narasumber dari kalangan ulama dan tokoh agama yang mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Ahmadiyah.¹⁰ Skripsi ini memiliki relevansi yang erat dengan penelitian yang sedang disusun, karena sama-sama mengangkat peristiwa Kerusuhan Monas 1 Juni 2008 sebagai objek

¹⁰ “Hasil akhir penelitian ini menunjukkan bahwa Kompas dan Republika memiliki kecenderungan keberpihakan yang berbeda dalam memberitakan insiden Monas. Kompas memaknai insiden Monas sebagai aksi kekerasan yang mencederai kebhinnekaan Sedangkan Republika memaknainya sebagai masalah negara yang lamban menyelesaikan Ahmadiyah”. lihat Panca Okta Hutabrina, “Insiden Monas Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Terhadap Berita Seputar Insiden Monas, 1 Juni 2008, Di Harian Kompas Dan Republika Periode 2–8 Juni 2008)” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 61–62.

kajian, sehingga hasil temuannya dapat memperkaya pemahaman tentang kronologi dan dinamika pemberitaan peristiwa tersebut, serta memperkuat analisis mengenai latar belakang konflik dan dampak pasca-peristiwa dalam skripsi yang sedang disusun. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara kedua penelitian. Skripsi Panca Okta Hutabrina menggunakan pendekatan analisis teks media dengan fokus pada bagaimana media membingkai peristiwa dari perspektif komunikasi, sementara penelitian yang sedang disusun menggunakan metode sejarah Kuntowijoyo yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, dengan tujuan merekonstruksi latar belakang, kronologi, dan dampak kerusakan secara faktual dan objektif dari perspektif sejarah. Dengan demikian, skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pustaka dan sumber sekunder untuk memperkaya analisis, namun tidak menggantikan pendekatan sejarah yang digunakan dalam penelitian yang sedang disusun.

2. Skripsi yang ditulis oleh Febyanti Junaedi (2009), mahasiswa Jurnalistik Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menulis skripsi berjudul *Konstruksi Realitas Pada Media Cetak: Analisis Framing Pemberitaan Insiden Monas di Koran Tempo dan Republika Edisi Juni 2008*. Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman untuk mengkaji bagaimana Koran Tempo dan Republika mengkonstruksi realitas terkait penyebab insiden Monas. Hasilnya menunjukkan bahwa Koran Tempo mendefinisikan insiden Monas sebagai masalah hukum pembubaran FPI akibat aksi kekerasan terhadap AKKBB yang dinilai mengancam kebebasan beragama, dengan solusi penangkapan pelaku dan pembubaran FPI. Sementara Republika mendefinisikannya sebagai persoalan penegakan hukum pembubaran Ahmadiyah, menilai kelambanan pemerintah sebagai penyebab bentrokan, dengan solusi penerbitan segera SKB Ahmadiyah.¹¹ Skripsi ini relevan dengan penelitian yang sedang disusun karena

¹¹”Koran Tempo mendefinisikan masalah pada masalah hukum pembubaran FPI Hingga pada bagian solusi, Koran Tempo memberikan solusi agar segera menangkap pelaku kekerasan di Monas serta memproses mereka ke meja hijau. Republika mendefinisikan masalah penyebab insiden Monas ke dalam penegakan hukum pembubaran Ahmadiyah. Republika memberikan solusi kepada

sama-sama mengkaji peristiwa Kerusuhan Monas 1 Juni 2008, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana media dengan latar belakang ideologis berbeda mengkonstruksi peristiwa yang sama. Namun demikian, perbedaan mendasar terletak pada pendekatan yang digunakan: penelitian ini menggunakan analisis framing dari perspektif komunikasi, sedangkan penelitian yang sedang disusun menggunakan metode sejarah Kuntowijoyo untuk merekonstruksi peristiwa secara faktual dan objektif. Dengan demikian, skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber sekunder untuk memperkaya analisis pemberitaan media, namun tidak menggantikan pendekatan sejarah yang digunakan dalam penelitian yang sedang disusun.

3. Fajar Aminullah (2016), mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, menulis skripsi berjudul *Kekerasan Atas Nama Agama dalam Pemberitaan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Insiden Monas Pada Koran Kompas dan Republika)*. Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman untuk mengkaji bagaimana Kompas dan Republika membingkai insiden Monas 1 Juni 2008.¹² Hasilnya menunjukkan bahwa Kompas mendefinisikan insiden tersebut sebagai masalah hukum dengan FPI sebagai penyebab kekerasan yang mencederai kebhinekaan, sehingga rekomendasinya adalah penegakan hukum terhadap pelaku. Sementara Republika mendefinisikannya sebagai masalah moral dengan Ahmadiyah sebagai sumber masalah akibat kelambanan pemerintah, sehingga rekomendasinya adalah penerbitan SKB dan pembubaran Ahmadiyah. Skripsi ini relevan dengan penelitian yang sedang disusun karena

pemerintah untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penghentian kegiatan Ahmadiyah dan jika perlu membubarkan Ahmadiyah.” Lihat Febyanti Junaedi, “Konstruksi Realitas Pada Media Cetak: Analisis Framing Pemberitaan Insiden Monas Di Koran Tempo Dan Republika Edisi Juni 2008” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 109–10.

¹² “Koran Kompas mengidentifikasi masalah ini kedalam masalah hukum, terkait dengan anarkisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat tersebut kepada AKKBB. Koran Kompas menggambarkan insiden Monas sebagai aksi kekerasan yang dilakukan massa beratribut Front Pembela Islam (FPI) dan organisasi kemasyarakatan lainnya terhadap Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) pada peringatan Hari Lahir Pancasila, Minggu 1 Juni 2008 di kawasan Monas, yang mencederai kehidupan kebangsaan di Indonesia yang menjunjung tinggi kebhinekaan.” Lihat Fajar Aminullah, “Kekerasan Atas Nama Agama Dalam Pemberitaan Media Massa (Analisis Framing Pemberitaan Insiden Monas Pada Koran Kompas Dan Republika)” (Universitas Negeri Jakarta, 2016), 38.

sama-sama mengkaji peristiwa Kerusuhan Monas 1 Juni 2008 dan menjadikan Kompas serta Republika sebagai objek kajian, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang konstruksi pemberitaan media atas peristiwa tersebut. Namun perbedaan mendasar terletak pada pendekatan yang digunakan: penelitian ini menggunakan analisis framing dari perspektif komunikasi, sedangkan penelitian yang sedang disusun menggunakan metode sejarah Kuntowijoyo untuk merekonstruksi peristiwa secara faktual dan objektif. Dengan demikian, skripsi ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber sekunder untuk memperkaya analisis pemberitaan media, namun tidak menggantikan pendekatan sejarah yang digunakan dalam penelitian yang sedang disusun.

4. Yosef Moan Banda (2016), dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Flores, menulis artikel jurnal berjudul *Tragedi Monumen Nasional Merupakan Cambuk Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus Sosial Kemasyarakatan)* yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan Ekonomi Volume 1 Nomor 1 April 2016. Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang menganalisis berita-berita aktual terkait kerusuhan Monas 1 Juni 2008 sebagai penyakit sosial yang menodai bangsa Indonesia, dengan fokus pada konflik terbuka antara FPI dan AKKBB serta langkah-langkah pemerintah melalui UU Ormas Nomor 8 Tahun 1985 dan penerbitan SKB Ahmadiyah. Artikel ini relevan dengan penelitian yang sedang disusun karena sama-sama mengkaji peristiwa Kerusuhan Monas 1 Juni 2008, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika konflik dan dampaknya bagi kehidupan berbangsa.¹³ Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya. Artikel Yosef Moan Banda menggunakan pendekatan kajian pustaka dari perspektif sosiologi dan pendidikan ekonomi tanpa melalui proses verifikasi dan kritik sumber secara ketat, serta bertujuan mengidentifikasi penyakit sosial dan memberikan rekomendasi penyelesaian konflik. Sementara penelitian yang sedang disusun menggunakan metode sejarah Kuntowijoyo yang mencakup

¹³ "Konflik dan kekerasan telah menodai bangsa Indonesia yang ditandai dengan kerusuhan Monas 1 Juni 2008. Konflik semacam ini dinamakan konflik terbuka, yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata." Yosef Moan Banda, "Tragedi Monumen Nasional Merupakan Cambuk Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 1, no. April 2016 (2016): 50.

heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi untuk merekonstruksi latar belakang, kronologi, dan dampak kerusuhan secara faktual dan objektif dari perspektif sejarah. Dengan demikian, artikel ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber sekunder untuk memperkaya analisis, namun tidak menggantikan pendekatan sejarah yang digunakan dalam penelitian yang sedang disusun.

Penelitian mengenai Kerusuhan Monas 1 Juni 2008 sebelumnya didominasi oleh kajian media, seperti penelitian Pancha Okta Hutabrina (2009), Febyanti Junaedi (2009), dan Fajar Aminullah (2016), yang menelaah konstruksi pemberitaan Kompas, Republika, dan Tempo. Sementara itu, kajian Yosef Moan Banda (2016) meninjau peristiwa ini dari perspektif sosiologis, namun belum menelusuri akar historis konflik secara komprehensif. Dengan demikian, belum terdapat penelitian yang merekonstruksi peristiwa Monas dalam konteks perubahan sosial-politik pasca Reformasi, posisi negara dalam eskalasi konflik, serta dampaknya terhadap hubungan antar-ormas Islam. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, serta menggunakan teori konflik sosial sebagai landasan analisis.

E. Metode Penelitian

Metode ilmiah dalam bidang ilmu merupakan pendekatan yang diterapkan untuk mencapai pemahaman yang menyeluruh. Pengetahuan komprehensif ini diperoleh oleh para pakar melalui rangkaian langkah atau tahapan tertentu. Menurut Kuntowijoyo (1943–2005) seorang sejarawan dan budayawan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu pelopor sejarah sosial di Indonesia yang merupakan guru besar sejarah Universitas Gadjah Mada yang juga banyak menulis tentang metodologi sejarah, di antaranya *Pengantar Ilmu Sejarah* (1995) dan *Metodologi Sejarah* (2003) Metode sejarah adalah proses mencari, mengumpulkan, mengevaluasi, memilih, dan menyampaikan fakta-fakta sejarah beserta interpretasinya secara sistematis.¹⁴ Dalam kerangka penelitian sejarah, metode ini

¹⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 28.

tidak hanya terbatas pada pengumpulan data masa lalu, tetapi juga melibatkan penafsiran dan analisis terhadap data tersebut untuk memahami arti dan relevansi peristiwa sejarah dalam konteks saat ini. Penelitian sejarah bertujuan merekonstruksi masa lampau secara terstruktur dan objektif berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu memberikan wawasan mendalam tentang kejadian yang terjadi.

Metode penelitian sejarah yaitu cara menangani sumber-sumber sejarah dengan pendekatan khusus untuk menghasilkan penulisan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁵ Pendekatan ini mencakup bukan hanya kemahiran teknis dalam mengumpulkan informasi, tetapi juga ketelitian dalam melakukan verifikasi sumber dan kedalaman dalam melakukan analisis. Hasil rekonstruksi kreatif tentang masa silam berdasarkan data tersebut dikenal sebagai historiografi, yaitu penyusunan sejarah. Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini adalah metode sejarah, yang mencakup beberapa langkah. Pertama, Heuristik, yaitu proses pengumpulan data sebagai bahan penelitian. Kedua, Kritik, yaitu tahap memverifikasi keaslian dan keakuratan data. Ketiga, Interpretasi, yaitu proses penafsiran dan analisis data agar peristiwa yang diteliti dapat dipahami secara menyeluruh. Langkah terakhir adalah Historiografi, yaitu tahap penyusunan sejarah.¹⁶ Setiap langkah ini saling terhubung dan membentuk suatu kesatuan proses yang terintegrasi dalam penelitian sejarah.

1. Heuristik

Tahap heuristik merupakan langkah pertama yang krusial dalam penelitian sejarah. Heuristik adalah aktivitas mengumpulkan jejak-jejak masa silam yang umumnya disebut sebagai sumber sejarah.¹⁷ Pada fase ini, peneliti secara aktif mengumpulkan berbagai bahan data yang terkait dengan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh sumber yang relevan dapat dikumpulkan dengan baik. Peneliti harus

¹⁵ Kuntowijoyo, 52.

¹⁶ Sjamsuddin Helius, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), 89–90.

¹⁷ Helius, 95.

menunjukkan ketekunan dan kecermatan dalam menjelajahi berbagai kemungkinan sumber yang dapat mendukung penelitian. Sumber-sumber tersebut kemudian dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi dokumen, artefak, wawancara langsung, atau bukti autentik yang berasal dari periode peristiwa itu sendiri. Sementara itu, sumber sekunder adalah karya-karya yang dibuat setelah kejadian terjadi, seperti buku, artikel, atau analisis yang berdasarkan pada sumber primer.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah bahan sejarah autentik dalam bentuk benda, informasi lisan, dokumen tertulis, atau catatan yang berasal langsung dari pelaku atau saksi kejadian dan dihasilkan pada saat peristiwa itu terjadi.¹⁸ Sumber primer merupakan kesaksian dari seorang saksi mata atau melalui indra lainnya, yang berada di lokasi peristiwa yang diceritakan.¹⁹ Sumber ini diklasifikasikan menjadi sumber cetak dan non-cetak, yang penerbitannya bisa dilakukan oleh entitas pemerintah atau non-pemerintah, dengan perbedaan pokok berada pada pengawasan isi dan substansi dokumen tersebut. Dalam penelitian ini, sumber primer berperan krusial karena menyediakan pandangan langsung tentang kejadian yang diteliti tanpa melalui penafsiran pihak ketiga.

1) Sumber Tertulis

- a) Arsip berita Antara News (8 Mei 2008) Terkait SKB Tiga Menteri dan ketegangan Ahmadiyah.
- b) Arsip Berita Kompas (Edisi 1-5 Juni).
- c) Arsip Berita Tempo (Edisi 1-7 Juni).
- d) Dokumen resmi SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah (9 Juni 2008)
- e) Fatwa MUI 2005 tentang aliran Ahmadiyah
- f) Fatwa MUI 2005 tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme.

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 92.

¹⁹ Ismaun, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Sejarah* (Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Bandung, 1992), 45.

- g) Laporan Tahunan Lembaga HAM (Januari 2009) yang diterbitkan oleh Setara Institute.
- h) Buku Habieb Rizieq Shihab (2007) hancurkan liberalisme tegakkan syariat islam.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak berasal dari pelaku, saksi, atau pihak yang mengalami langsung peristiwa sejarah, melainkan berasal dari pihak lain yang mengolah, menafsirkan, atau menyimpulkan data sejarah berdasarkan sumber primer. Menurut Kuntowijoyo, sumber sekunder merupakan karya yang dihasilkan oleh para ahli atau penulis yang melakukan interpretasi terhadap fakta sejarah, sehingga menghasilkan laporan, tulisan ilmiah, buku, atau artikel yang membantu peneliti memahami suatu peristiwa dalam kerangka ilmiah yang lebih luas.²⁰

1) Sumber Tertulis

- a) Buku Tragedi Monas Berdarah Dalam penelitian ini, buku Achmad Setyaji berjudul *Tragedi Monas Berdarah* digunakan sebagai sumber sekunder. Buku tersebut tidak ditulis oleh saksi langsung, melainkan merupakan hasil rekonstruksi penulis berdasarkan pengumpulan data dari media, laporan organisasi masyarakat, pernyataan pemerintah, serta interpretasi pribadi terhadap peristiwa Kerusuhan Monas 1 Juni 2008.

2. Kritik

Dalam kajian sejarah, kritik sumber merupakan langkah krusial yang digunakan untuk menilai apakah suatu data benar-benar otentik, sah, dan layak dijadikan acuan. Menurut Kuntowijoyo, kritik merupakan upaya untuk menyaring dan memeriksa setiap sumber sehingga peneliti hanya menggunakan informasi

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 54.

yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan relevan dengan penelitian.²¹ Kuntowijoyo menyatakan bahwa kritik diperlukan agar peneliti mampu membedakan sumber yang otentik dari yang tidak, sekaligus menilai apakah isi yang disajikan memiliki akurasi ilmiah.²² Dengan kata lain, kritik berfungsi agar peneliti tidak menerima data secara mentah, tetapi melalui rangkaian evaluasi yang terstruktur dan objektif.

a. Kritik Ekstern

Kritik ini bertujuan untuk menilai keaslian fisik dokumen, seperti tahun penerbitan, penulis, jenis tulisan, bentuk dokumen, dan ciri-ciri fisik lainnya. Kritik ekstern memastikan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari zaman dan orang yang tepat, bukan tiruan atau rekonstruksi belakangan.²³

1) Sumber Tertulis

a) Arsip berita Antara News (8 Mei 2008) Terkait SKB Tiga Menteri dan ketegangan Ahmadiyah.

Sumber berbentuk arsip digital yang tersimpan dalam basis data Antara. Meskipun tidak memiliki bentuk fisik seperti dokumen cetak, format digital tersebut memenuhi syarat sebagai dokumen resmi dan tidak menunjukkan kerusakan atau distorsi teks. Arsip dari Antara News merupakan koran digital diterbitkan pada Tanggal 8 Mei 2008 21:42 WIB yang di edit oleh Kunto wibisono sebelum keluarnya SKB Tiga Menteri pada 9 Juni 2008. Antara News dapat dipastikan keasliannya karena Antara merupakan kantor berita nasional yang berdiri sejak 1937 dan berstatus sebagai lembaga resmi negara. Keaslian berita ini dapat diverifikasi melalui situs resmi Antara News maupun katalog digitalnya, yang memuat tanggal publikasi, nama penulis atau wartawan, serta struktur berita yang mengikuti standar jurnalistik.

²¹ Kuntowijoyo, 95.

²² Kuntowijoyo, 96.

²³ Kuntowijoyo, 98.

b) Arsip Berita Kompas (Edisi 1-5 Juni)

Arsip koran ini merupakan koran digital yang di akses melalui situs resmi kompas dan memiliki identitas fisik yang jelas, seperti penanggalan, nomor edisi, halaman, serta rubrik berita. Kompas merupakan surat kabar nasional yang kredibilitasnya diakui luas sejak terbit pada 1965. Karena edisi yang digunakan terbit tepat pada rentang waktu insiden Monas, maka kredibilitas waktu publikasinya sangat kuat. Dari segi identitas penulis dan lembaga penerbit, berita-berita dalam edisi tersebut ditulis oleh jurnalis Kompas yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik Indonesia. Dalam pemeriksaan konteks penerbitan, berita Kompas tanggal 1–5 Juni berada pada masa ketika ketegangan antara massa pro-dan anti-Ahmadiyah meningkat pasca keluarnya SKB Tiga Menteri dan berjalannya berbagai aksi massa di Jakarta.

c) Arsip Berita Tempo (Edisi 1-7 Juni).

Arsip yang digunakan berada dalam kondisi lengkap, memuat tanggal terbit, judul, rubrik, dan keseluruhan isi berita tanpa ada bagian yang hilang. Pada versi digital, dokumen sudah melalui proses digitalisasi oleh pihak Tempo sehingga terbaca jelas, tidak mengalami kerusakan teks, dan tetap mempertahankan format aslinya. Kondisi ini memastikan bahwa dokumen dapat dianalisis tanpa ada distorsi fisik. Dokumen yang digunakan berasal dari edisi cetak maupun versi arsip digital *Tempo.co* sehingga dapat dipastikan sebagai dokumen asli, bukan reproduksi tanpa sumber. Seluruh laporan pada edisi tanggal 1–7 Juni 2008 memiliki nomor edisi, tanggal publikasi, serta identitas penulis berita, sehingga memenuhi standar autentik dokumen pers. Laporan dalam edisi 1–7 Juni 2008 diterbitkan segera setelah peristiwa Kerusuhan Monas terjadi.

d) Dokumen resmi SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah (9 Juni 2008)

Kritik eksternal dilakukan untuk menilai keaslian dan kredibilitas *Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri* tanggal 9 Juni 2008 sebagai sumber primer. Secara fisik dan struktur, dokumen ini sesuai dengan

format resmi keputusan pemerintah, lengkap dengan bagian Menimbang, Mengingat, dan Menetapkan, serta nomor keputusan masing-masing kementerian yang konsisten dengan standar administrasi negara. Isi dokumen juga menggunakan bahasa hukum formal dan memuat dasar-dasar hukum yang relevan, seperti UUD 1945, UU PNPS 1965, dan UU HAM 1999, sehingga mendukung autentisitasnya. Otoritas penerbit Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan legal untuk mengeluarkan SKB terkait pengawasan kehidupan keagamaan melalui PAKEM. Selain itu, konteks historis penerbitannya selaras dengan situasi pada tahun 2008, termasuk adanya ketegangan terkait Ahmadiyah dan rapat-rapat PAKEM yang disebutkan dalam dokumen.

e) Fatwa MUI tentang Aliran Ahmadiyah

Dokumen Fatwa MUI Nomor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Aliran Ahmadiyah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah lembaga keagamaan resmi yang dibentuk pada tahun 1975 dan diakui oleh negara sebagai wadah musyawarah para ulama di Indonesia. Fatwa ini dikeluarkan melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) VII MUI yang berlangsung pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H atau bertepatan dengan 26-29 Juli 2005 M di Jakarta. Dokumen ini ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa yang terdiri dari Ketua KH. Ma'ruf Amin dan Sekretaris Drs. Hasanuddin, M.Ag. Keduanya adalah tokoh yang memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam bidang keagamaan di Indonesia, dengan KH. Ma'ruf Amin pada saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat dan kemudian dikenal sebagai figur yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai fatwa MUI. Fatwa ini dibuat pada masa pasca-Reformasi ketika ruang publik mengalami keterbukaan yang signifikan, dan kondisi sosial-politik ini sangat memengaruhi proses pembuatan fatwa, sebagaimana tercantum dalam bagian "Menimbang" yang menyebutkan bahwa fatwa ini merupakan respons terhadap keresahan masyarakat dan permintaan penegakan kembali atas fatwa sebelumnya.

f) Fatwa MUI tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama

Dokumen Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama, yang ditetapkan pada 28 Juli 2005 di Jakarta. Berdasarkan penelusuran terhadap dokumen tersebut, dapat diketahui bahwa fatwa ini dikeluarkan oleh lembaga resmi keagamaan tertinggi di Indonesia, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui mekanisme Musyawarah Nasional VII yang berlangsung pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H atau 26-29 Juli 2005 M. Dokumen ini ditandatangani oleh Ketua Sidang Komisi C Bidang Fatwa, K.H. Ma'ruf Amin, dan Sekretaris, Drs. Hasanuddin, M.Ag, yang menunjukkan keabsahan prosedural penerbitan fatwa tersebut. Secara fisik maupun administratif, dokumen ini merupakan produk resmi lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam penerbitan fatwa di Indonesia. Dengan demikian, dari segi kritik eksternal, dokumen ini dinyatakan otentik dan asli karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang sah serta memiliki bukti administratif yang jelas.

g) Laporan Tahunan Lembaga HAM (Januari 2009)

Dokumen *“Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia – Laporan Tahunan 2008”* merupakan laporan resmi yang diterbitkan oleh SETARA Institute, lembaga independen yang fokus pada advokasi demokrasi dan HAM. Secara fisik dan bibliografis, dokumen ini diterbitkan pada Januari 2009, memiliki xviii + 146 halaman, berukuran 15 x 21 cm, dan memiliki ISBN 978-979-19832-0-4. Informasi publikasi yang lengkap, susunan editor, pembaca ahli, serta tim pengumpul data tercantum jelas di halaman awal, sehingga secara identitas dokumen dapat dinyatakan autentik dan dapat diverifikasi. Selain itu, laporan ini merupakan laporan tahunan kedua, sehingga berada dalam rangkaian publikasi resmi yang bersifat berkelanjutan, bukan laporan ad-hoc spontan. Tidak ditemukan

indikasi manipulasi fisik, perubahan halaman, atau ketidakwajaran dalam struktur bibliografis.

b. Kritik Intern

Kritik ini bertujuan menilai kredibilitas **isi** dokumen, yaitu apakah informasi yang terkandung di dalamnya dapat dipercaya. Kritik intern dilakukan dengan menganalisis fakta, memahami konteks, membandingkan berbagai sumber, dan menilai konsistensi keterangan.²⁴

1) Sumber Tertulis

a) Arsip berita Antara News (Mei 2008) Terkait SKB Tiga Menteri dan ketegangan Ahmadiyah

Kritik intern dilakukan untuk menilai kebenaran isi, konsistensi logis, serta akurasi informasi yang disampaikan dalam arsip berita Antara News edisi 8 Mei 2008. Dari sisi konsistensi narasi, isi berita menunjukkan alur argumentasi yang logis dan runtut. Antara memaparkan perkembangan penyusunan SKB Tiga Menteri secara berurutan mulai dari pernyataan pejabat pemerintah, respons masyarakat, hingga kondisi situasi sosial pada saat itu. Terkait akurasi informasi, berita ini memuat kutipan langsung dari pejabat pemerintah serta merujuk pada sumber resmi seperti pernyataan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

b) Arsip Berita Kompas (Edisi 1-5 Juni)

Dari aspek keakuratan informasi, pemberitaan Kompas periode ini umumnya menggunakan data faktual berdasarkan laporan lapangan jurnalis serta keterangan aparat keamanan. Namun, beberapa berita lebih menonjolkan keterangan resmi pemerintah atau kepolisian, sehingga kemungkinan adanya dominasi perspektif negara harus diasumsikan. Dalam konteks pemberitaan Monas 2008, terdapat

²⁴ Kuntowijoyo, 99–100.

kecenderungan naratif yang berusaha menjaga keseimbangan antara pelaporan fakta bentrokan dan upaya menghindari pembingkai negatif yang terlalu keras terhadap ormas tertentu. Meski demikian, beberapa artikel tetap menunjukkan framing bahwa aksi massa pro-Ahmadiyah berada pada posisi korban, sementara kelompok lain ditampilkan lebih dominan dalam aksi kekerasan. Hal ini perlu dipertimbangkan sebagai potensi bias redaksional. Arsip berita Kompas 1–5 Juni menyajikan kronologi yang cukup runtut mengenai situasi pasca bentrok, termasuk reaksi pemerintah, tokoh agama, serta respons ormas Islam.

c) Arsip Berita Tempo (Edisi 1-7 Juni).

Isi pemberitaan *Tempo* pada edisi 1–7 Juni 2008 ditulis dengan standar jurnalisme profesional, mencakup pengumpulan data lapangan, kutipan narasumber, serta penjelasan kronologi. Berita disusun untuk kebutuhan publik, sehingga kedalaman sejarah dan konteks sosial belum sepenuhnya komprehensif. Beberapa berita memuat data kronologi, jumlah korban, dan pernyataan tokoh, tetapi data tersebut bersifat laporan awal yang masih dapat berubah. Dalam liputan awal, *Tempo* banyak mengutip pernyataan dari pihak kepolisian, perwakilan ormas yang terlibat, saksi mata, dan tokoh publik. Namun, tidak semua narasumber diberikan porsi yang sama. Ada kecenderungan dominan suara dari aktor resmi (polisi/pemerintah), sementara narasi beberapa pihak lain mungkin belum tampil secara seimbang. Berita pada edisi 1–7 Juni 2008 memiliki konsistensi dalam hal kronologi dasar peristiwa.

d) Dokumen resmi SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah (9 Juni 2008)

Kritik internal terhadap SKB Tiga Menteri 9 Juni 2008 menunjukkan bahwa isi dokumen memiliki kecenderungan normatif dan tidak sepenuhnya netral. SKB secara tegas memerintahkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan penafsiran yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam mayoritas, sehingga memperlihatkan adanya bias negara dalam memihak pandangan keagamaan tertentu. Meskipun terdapat peringatan kepada masyarakat agar tidak

melakukan tindakan melawan hukum terhadap Ahmadiyah, bagian ini hanya bersifat tambahan dan tidak mengimbangi fokus utama SKB yang membatasi aktivitas JAI. Dokumen ini juga mencerminkan motif sosial-politik pemerintah untuk meredakan tekanan publik dan menjaga stabilitas setelah meningkatnya ketegangan terkait Ahmadiyah pada awal 2008. Istilah-istilah yang digunakan seperti “*penyimpangan*,” “*mengganggu ketertiban*,” dan “*kegiatan yang menyerupai*” bersifat longgar dan memungkinkan interpretasi subyektif, sehingga menunjukkan bahwa isi SKB tidak sepenuhnya objektif.

e) Fatwa MUI 2005 Tentang Aliran Ahmadiyah

Fatwa MUI tahun 2005 menunjukkan konsistensi logis yang kuat dalam argumentasi teologisnya. Dokumen ini secara sistematis menguraikan landasan-landasan pengambilan keputusan, mulai dari dalil Al-Qur'an (QS. al-Ahzab [33]: 40, QS. al-An'am [6]: 153, QS. al-Ma'idah [5]: 105), hadis Nabi, hingga keputusan forum-forum ulama internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami OKI tahun 1985 yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah adalah murtad dan keluar dari Islam. Konsistensi logis ini terlihat dari metode penalaran yang sistematis: dokumen ini menelusuri sejarah ajaran Ahmadiyah, mengidentifikasi pokok ajaran Mirza Ghulam Ahmad termasuk pengakuan kenabiannya lalu membandingkannya dengan doktrin khatam an-nubuwwah yang disepakati oleh mayoritas ulama Sunni.

f) Fatwa MUI 2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama

Fatwa ini membahas tiga paham yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Definisi yang digunakan bersifat empirik, merujuk pada pemahaman yang berkembang di masyarakat, sehingga fatwa ini merupakan respons langsung terhadap fenomena sosial-keagamaan di Indonesia pada awal tahun 2000-an. Namun demikian, beberapa kelemahan dapat ditemukan. Pertama, fatwa ini tidak membedakan secara tegas antara pluralisme sebagai paham filosofis dan pluralitas sebagai kenyataan sosiologis. Kedua, fatwa ini menggunakan dalil-dalil naqli secara selektif tanpa

mempertimbangkan konteks historis dan sosio-kultural ayat-ayat tersebut. Ketiga, fatwa ini tidak menyertakan argumentasi dari pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda. Keempat, secara yuridis formal fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum positif karena MUI bukan lembaga negara pembuat undang-undang. Meskipun demikian, fatwa ini tetap kredibel sebagai dokumen keagamaan yang relevan untuk memahami posisi resmi MUI terhadap isu-isu kontemporer, termasuk kasus Ahmadiyah yang menjadi salah satu faktor pemicu Kerusuhan Monas 1 Juni 2008. Fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan Ahmadiyah sebagai aliran sesat menjadi landasan moral bagi kelompok seperti FPI dalam melakukan aksi penolakan terhadap Ahmadiyah, yang pada akhirnya memicu bentrokan di Monas. Dengan demikian, dokumen ini dapat dijadikan sebagai sumber sejarah untuk memahami latar belakang ideologis dan keagamaan dari konflik tersebut.

g) Laporan Tahunan Lembaga HAM (Januari 2009) yang diterbitkan oleh Setara Institute.

Isi laporan SETARA Institute dinilai cukup konsisten dan kredibel karena menggunakan kerangka analisis berbasis HAM internasional serta menyajikan data kuantitatif yang jelas mengenai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama sepanjang 2008. Data antarbagian selaras dengan narasi analitis, misalnya lonjakan kasus pada Juni yang dikaitkan dengan keluarnya SKB Ahmadiyah. Namun, laporan ini tetap membawa perspektif advokasi sehingga interpretasinya cenderung kritis terhadap negara. Meski demikian, metode pengumpulan data melalui pemantauan lapangan, monitoring media, dan wawancara menunjukkan bahwa informasi yang disajikan masih dapat dianggap valid.

3. Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan fase ketika peneliti menafsirkan serta mengaitkan berbagai sumber sejarah untuk membangun gambaran peristiwa yang menyeluruh. Interpretasi pada hakikatnya adalah proses merangkai fakta sehingga menghasilkan

pemahaman yang sistematis dan logis tentang perkembangan suatu peristiwa.²⁵ Dalam penelitian ini, interpretasi diarahkan pada upaya memahami secara komprehensif latar sosial, dinamika interaksi, serta makna konflik antara Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Nasional untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang mencapai puncaknya pada insiden penyerangan di Monas pada 1 Juni 2008. Untuk itu, teori konflik sosial dari Soerjono Soekanto dan Lewis A. Coser dijadikan kerangka untuk membaca pola hubungan antaraktor, kondisi sosial-politik yang melingkupi, dan struktur nilai yang menjadi pemicu pertentangan.

Menurut Soerjono Soekanto seorang sosiolog dan guru besar Universitas Indonesia yang dikenal sebagai salah satu tokoh sosiologi hukum di Indonesia. Karya monumentalnya, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (1982) dan *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (1976), menjadi rujukan utama dalam kajian sosiologi dan konflik sosial di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, konflik sosial akan muncul ketika terdapat perbedaan mendasar mengenai nilai, tujuan, atau kepentingan antar kelompok dalam masyarakat. Konflik menjadi tidak terhindarkan apabila perbedaan nilai tersebut bersifat esensial, tidak dapat disatukan, dan telah melekat sebagai bagian dari identitas kelompok. konflik sosial akan muncul ketika terdapat perbedaan mendasar mengenai nilai, tujuan, atau kepentingan antar kelompok dalam masyarakat.²⁶ Dalam kasus Monas, pertentangan nilai tampak sangat jelas. FPI mengusung agenda perlindungan akidah dan moral keagamaan dari ajaran yang mereka anggap menyimpang, terutama Ahmadiyah. Sementara itu, AKKBB memperjuangkan prinsip pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama sebagaimana dijamin konstitusi. Dua orientasi nilai ini bukan hanya berbeda, tetapi berseberangan secara diametral. Masing-masing kelompok menganggap nilai yang mereka bawa sebagai prinsip dasar yang wajib diperjuangkan. Soekanto juga menekankan bahwa konflik biasanya membesar jika tidak tersedia mekanisme pengendalian sosial yang efektif atau jika mediasi tidak.²⁷ Minimnya langkah

²⁵ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah Edisi Kedua* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), 19.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 91–95.

²⁷ Soekanto, 113–18.

mediasi dari pemerintah, khususnya setelah keluarnya SKB Tiga Menteri, membuat ketegangan yang awalnya laten berkembang menjadi konflik terbuka di ruang publik.

Di sisi lain, teori yang dikembangkan Lewis A. Coser memberi penjelasan mengenai bagaimana konflik tersebut bergerak dan mengapa ia berubah menjadi kekerasan. Dalam *Fungsi Konflik Sosial* (terj. LP3ES, 1992), Lewis A. Coser (1913–2003) adalah sosiolog Amerika kelahiran Jerman yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam teori konflik sosial. Murid dari Robert K. Merton ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran Georg Simmel, dan karya monumentalnya, *The Functions of Social Conflict* (1956) atau *Fungsi Konflik Sosial* (terj. LP3ES, 1992), menawarkan perspektif bahwa konflik tidak selalu bersifat destruktif, melainkan juga memiliki fungsi positif bagi integrasi sosial. Coser membedakan antara konflik realistik, yang didasarkan pada benturan kepentingan konkret dan dapat diselesaikan melalui kompromi, serta konflik non-realistik yang muncul dari kebutuhan agresi. Coser juga menyebutkan bahwa konflik akan mudah meluas ketika komunikasi antar kelompok tidak berjalan atau tertutup. Coser menegaskan bahwa konflik tidak selalu membawa dampak negatif; dalam banyak kasus, konflik memperkuat identitas kelompok, meneguhkan struktur internal, dan meredakan ketegangan di dalam kelompok.²⁸ Coser menyatakan bahwa konflik realistik konflik yang didasarkan pada benturan kepentingan konkret umumnya terjadi ketika satu kelompok merasa nilai atau identitasnya terancam.²⁹ Dalam insiden Monas, FPI memandang aksi AKKBB sebagai ancaman terhadap moralitas publik dan kemurnian ajaran Islam, sedangkan AKKBB memandang sikap FPI sebagai pembatasan kebebasan beragama dan hak sipil. Dengan demikian, masing-masing pihak melihat pihak lain sebagai ancaman yang bersifat eksistensial. Coser juga menyebutkan bahwa konflik akan mudah meluas ketika komunikasi antar kelompok tidak berjalan atau tertutup.³⁰ Situasi ini sangat terlihat menjelang aksi Monas: tidak ada upaya dialog atau mediasi, sementara narasi masing-masing

²⁸ Lewis A Coser, *Fungsi Konflik Sosial*. Terj (Jakarta: LP3ES, 1992), 35–49.

²⁹ Coser, 73–75.

³⁰ Coser, 121–25.

kelompok semakin memperkuat batas identitas internal mereka. Setelah kekerasan pecah, baik FPI maupun AKKBB menunjukkan kecenderungan memperkuat solidaritas internalnya, sebagaimana fungsi integratif konflik yang dijelaskan.³¹

Jika kedua teori tersebut dipadukan, gambaran mengenai Kerusuhan Monas menjadi lebih utuh. Perspektif Soekanto membantu menjelaskan faktor pemicu konflik benturan nilai dasar, lemahnya mekanisme kontrol sosial, dan tidak adanya mediasi yang seharusnya dapat meredakan ketegangan. Sementara itu, teori Coser memberikan pemahaman tentang bagaimana konflik berkembang menjadi kekerasan dan bagaimana konflik justru memperkuat kohesi internal kelompok yang bertikai. Kerusuhan Monas 1 Juni 2008 bukanlah kejadian spontan, melainkan hasil dari proses panjang pertentangan ideologis antara kelompok keagamaan konservatif dan kelompok pendukung pluralisme di Indonesia pasca-Reformasi. Secara keseluruhan, hasil interpretasi menunjukkan bahwa insiden Monas merupakan bentuk konflik struktural yang dipengaruhi oleh pertentangan nilai, perebutan legitimasi moral, serta dinamika sosial-politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia setelah Reformasi. Peristiwa tersebut mencerminkan ketegangan yang lebih luas terkait relasi antara agama, kebebasan berkeyakinan, dan ruang publik dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Pendekatan interpretatif ini tidak hanya menggambarkan latar belakang dan jalannya konflik, tetapi juga menempatkan kerusuhan Monas sebagai bagian dari proses transformasi sosial yang terus berlangsung, di mana kelompok-kelompok dalam masyarakat berupaya mempertahankan identitas sekaligus merespons perubahan nilai yang terjadi.

4. Historiografi

Tahapan terakhir dalam penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu proses penulisan hasil penelitian setelah peneliti melalui tahapan pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi atau kritik sumber, serta interpretasi atas fakta-fakta sejarah. Historiografi merupakan aktivitas merangkai fakta sejarah menjadi kisah yang

³¹ Coser, 53–55.

runtut dan analitis sehingga mampu menjelaskan dinamika suatu peristiwa secara utuh serta berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.³² Dalam penelitian berjudul “*Kerusuhan Monas 1 Juni 2008: Studi Historis tentang Konflik Front Pembela Islam (FPI) dan Aliansi Nasional untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB)*”, penulisan historiografi disusun dalam empat bab utama sebagaimana lazimnya karya penelitian sejarah. Setiap bab disusun berdasarkan urutan logis peristiwa dan analisis kritis terhadap sumber primer maupun sekunder yang relevan.

Bab I Pendahuluan Bab ini berfungsi sebagai landasan metodologis sekaligus pengantar penelitian. Latar belakang diawali dengan gambaran dinamika sosial-politik Indonesia pasca-Reformasi yang ditandai menguatnya peran ormas sipil namun juga memicu gesekan horizontal berbasis identitas. Kerusuhan Monas 1 Juni 2008 dipilih karena merepresentasikan benturan ideologis antara FPI dan AKKBB serta menyoroti lemahnya peran negara dalam mengelola konflik komunal. Rumusan masalah diarahkan pada dua pertanyaan pokok: latar belakang konflik, kronologi peristiwa, dan dampaknya. Tujuan penelitian dirumuskan untuk merekonstruksi peristiwa secara objektif serta menganalisis faktor-faktor dan konsekuensi bentrokan. Metode penelitian sejarah mengacu pada pedoman Kuntowijoyo, mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi yang diterapkan secara sistematis dalam bab-bab berikutnya.

Bab II Latar belakang konflik Monas 1 juni Bab ini memuat faktor-faktor yang melatarbelakangi bentrokan. Kondisi sosial-politik jelang 2008 di mana kebebasan pasca-Reformasi memicu munculnya kelompok, sementara negara belum memiliki mekanisme pengelolaan konflik berbasis identitas yang memadai. Sejarah FPI dan AKKBB ditelusuri untuk memahami karakter dan ideologi masing-masing, dengan FPI sebagai ormas Islam vokal dalam isu moral dan AKKBB sebagai kelompok yang dianggap mengayomi minoritas termasuk Ahmadiyah.

³² Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*, 19.

Bab III Kronologi kerusuhan dan dampak dinamika hubungan FPI dan AKKBB pasca peristiwa Bab ini menyajikan faktor internal dan eksternal pemicu konflik rekonstruksi faktual dan analisis dampak. Kronologi kerusuhan direkonstruksi dari sumber terverifikasi dengan menyajikan seluruh narasi secara berimbang, mengingat perbedaan versi antara FPI (mengklaim pembelaan diri) Sumber netral digunakan untuk memvalidasi fakta dasar seperti jumlah korban. Dampak kerusuhan dianalisis dari dimensi hukum (penangkapan anggota FPI), serta munculnya desakan pembubaran FPI dari berbagai elemen masyarakat.

Bab IV Kesimpulan Bab ini merupakan sintesis final dari seluruh penelitian. Kesimpulan menegaskan bahwa Kerusuhan Monas 1 Juni 2008 bukan sekadar kekerasan insidental, melainkan cerminan rapuhnya dialog antarkelompok dengan perbedaan pandangan keagamaan mendasar serta lemahnya peran negara. Pasca-peristiwa, hubungan FPI dan AKKBB semakin renggang tanpa rekonsiliasi, dengan kekerasan justru memperlebar jurang permusuhan. Saran disusun sebagai rekomendasi bagi penguatan forum dialog lintas komunitas, revitalisasi pendidikan moderasi beragama, dan peningkatan kapasitas aparat negara dalam mendeteksi serta mengelola konflik identitas secara efektif. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi kajian sejarah sosial-politik Indonesia kontemporer sekaligus bahan refleksi bagi upaya deradikalisasi ke depan.